RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 7/PUU-XVII/2019

“Kewajiban Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial”

I. PEMOHON

Nur Ana Apfianti, selanjutnya disebut Pemohon.

Kuasa Hukum:

Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., Moh. Noval Ibrohim Salim, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat “SHOLEH and PARTNERS” yang berdomisili hukum di Jln. Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU 24/2011).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU 24/2011), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

1. Pasal 14:

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3):

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Penjelasan UU 24/2011 dinyatakan sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu;
2. Bahwa kesehatan sebagai salah satu bagian dari hajat hidup orang banyak merupakan hak yang dilindungi dan wajib dipenuhi negara sebagai perwujudan tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana termuat

dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. Bahwa BPJS yang dibentuk melalui UU 24/2011 dan UU 40/2004 yang mengatur sistem jaminan sosial nasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011. Pasal 14 UU 24/2011 menyatakan: "*Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial*". Bahwa, kata wajib di dalam pasal *a quo* memberikan makna, setiap orang, baik anak-anak maupun dewasa, orang miskin maupun orang kaya semuanya wajib ikut program jaminan sosial kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
4. Bahwa mekanisme pelayanan peserta BPJS Kesehatan tidak sama dengan asuransi swasta dimana BPJS Kesehatan dalam prakteknya menerapkan rujukan berjenjang dan keterbatasan untuk obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS. Sementara dengan asuransi swasta yang diikuti oleh Pemohon mengatur peserta asuransi diperbolehkan memilih dirawat di rumah sakit manapun yang bekerjasama dengan asuransi swasta dan obat-obatan telah ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi;
5. Bahwa Pemohon tidak bisa memahami mengapa pembuat UU mewajibkan seluruh warga negara harus ikut program BPJS Kesehatan. Jika tujuannya untuk membantu warga yang miskin agar bisa tercover pelayanan kesehatan, tentu seharusnya yang diwajibkan ikut adalah orang miskin saja. Sebab negara memberikan bantuan dengan membayar iuran orang miskin ke BPJS sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU 24/2011. Tetapi untuk warga yang mampu akan mencari asuransi yang kredible dan tidak banyak aturan ketika melakukan klaim saat peserta mengalami sakit. Seharusnya negara tidak perlu memaksa-maksa warga untuk ikut BPJS Kesehatan;

6. Bahwa dengan model pemaksaan ini wajar sekali sekarang ini golongan orang mampu yang tidak ikut asuransi swasta jika mengalami sakit berat dan tidak mau keluar uang banyak, baru mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Setelah sembuh dari penyakitnya, mereka tidak lagi membayar iuran peserta BPJS Kesehatan. Alhasil akhirnya BPJS Kesehatan mengalami kerugian dalam setiap tahunnya. Sebab antara pemasukan keuangan dengan pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit lebih besar;
7. Bahwa Pasal 14 UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Sebab, makna negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sementara kewajiban menjadi peserta bagi setiap warga tidak hanya berlaku kepada orang miskin namun juga orang mampu. Disinilah letak ketidakpahaman pembentuk UU dalam melihat konsep kewajiban perlindungan kesehatan oleh Negara kepada masyarakat tidak mampu;
8. Bahwa kata “mengembangkan” yang digunakan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 berarti bahwa tanggung jawab negara dalam rangka memenuhi hak warga negara atas jaminan sosial adalah sebatas “*membuat sistem jaminan sosial yang telah ada menjadi lebih besar atau lebih maju*”, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengembangkan” berarti “menjadikan besar (luas, merata)” atau “menjadikan maju (baik, sempurna)”. negara, terutama pemerintah, dalam memenuhi hak atas jaminan sosial warga negara tidak harus menyelenggarakan secara langsung, seperti dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas jaminan sosial adalah sebatas “mengembangkan” sistem yang disesuaikan dengan kemampuan negara;
9. Bahwa ketentuan Pasal 14 UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*” Bahwa, frasa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan harus dimaknai disesuaikan dengan

- kemampuan keuangan negara, yakni idealnya di semua wilayah baik perkotaan maupun pedesaan fasilitas kesehatannya sama, namun faktanya rumah sakit pemerintah yang ada diperkotaan dan pedesaan tidak sama kualitasnya. Hal ini menunjukkan negara secara keuangan masih belum bagus sehingga tidak mampu membangun fasilitas kesehatan secara merata;
10. Selanjutnya menurut Pemohon, penyediaan fasilitas kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 harus dimaknai kewajiban Negara, bukan kewajiban warga negara. Pembuat UU tidak bisa membedakan apa itu kewajiban negara, apa itu kewajiban warga negara. Terkait fasilitas kesehatan yang layak adalah kewajiban negara, sementara membayar pajak adalah kewajiban warga Negara. Selanjutnya dari hasil kewajiban pembayaran pajak oleh warga negara, maka negara mengelola keuangan hasil pembayaran pajak untuk pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan. Menjadi aneh dan double kewajiban jika warga negara sudah diwajibkan membayar pajak juga diwajibkan untuk membayar iuran kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU 24/2011;
  11. Bahwa pembentuk UU mengancam memberikan sanksi kepada penduduk yang tidak ikut program BPJS sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No 24/2011 yang menyatakan: *Yang dimaksud dengan “pelayanan publik tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan.* Selanjutnya juga terdapat ancaman jika warga Negara tidak mendaftarkan dirinya ke BPJS paling lambat diberlakukan tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 yang menyatakan: *“kewajiban melakukan pendaftaran sebagai peserta jaminan kesehatan bagi PBP dan BP dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2019”.*

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan:

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 116) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).